

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bachtiar, 2015, *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- C.S.T. Kansil, Dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*
- Hans Kelsen, 1949, *General Theory of Law and State*, Cambridge: Harvard University Press
- Jimly Asshidiqie, Ahmad Syahrizal, 2012, *Peradilan Konstitusi di 10 Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer
- Jonaedi Effendi, Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Nofmatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana
- K.C.Wheare, 2015, *Konstitusi-konstitusi Modern: Modern Constitutional*, Bandung: Nusa Media
- Martitah, 2016, *Mahkamah Konstitusi dari Negatif Legislator ke Positif Legislator*, Jakarta, Konstitusi Pers
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif Dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta
- Tufiqurrohman Syahuri, 2011, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana
- Zainal Arifin Hoesein, 2013, *Judicial Review Di Mahkamah Agung RI*, Jakarta: Rajawali Pers

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, diubah ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi

Basic Law 1949, Konstitusi Federal Jerman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116: PUU-XXI: 2023-Ambang Batas Parlemen

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Tentang Parliamentary Threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 Tentang Undang-Undang KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XXI/2023 Tentang Undang-Undang KPK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-XXI/2023 Tentang Presidential Threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XXI/2023 Tentang Presidential Threshold

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XXI/2023 Tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XXI/2023 Tentang Cipta Kerja

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XVII/2020 Tentang Undang-Undang Mahkamah Konstitusi



D. Jurnal

Ana Fauzi, Fathul Hamdani, 2021, The Revitalization of the Indonesian Legal System in the Order of Realizing the Ideal State law, Jurnal Progressive Law Review, Volume 3, Nomor 1

Alfin Yuza Pratama, 2023, Skripsi Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Pembatalan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Cholidin Nasir, 2020, "Judicial Review di Amerika Serikat, Jerman, dan Indonesia", Jurnal Hukum Progresif, Volume 8, Nomor 1

Gayatri Dyah Suprobowati, Alvina Sylviadiantri, 2022, "Sistematika, Prosedur, dan Syarat Pengajuan Judicial Review Di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Volume 1, Nomor 3

Ilhamdi Putra, Khairul Fahmi, 2021, Karakteristik Ne Bis In Idem dan Unsurnya dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Volume 18, Nomor 2

Munawara Idris, Kusnadi Umar, 2020, "Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review" Jurnal Siyasatuna, Volume 1 Nomor 2

Priandita Koswara, Megawati, 2023, "Analisis Prinsip Independensi Hakim Konstitusi di Indonesia", Jurnal Ahmad Dahlan Legal Perspective, Volume 3 No. 1

E. Internet

Aida Mardatillah, Lima Putusan Judicial Review MA Jadi Sorotan Publik Sepanjang 2018, hukumonline.com/LimaPutusaJjudicialReviewMASorotanPublikSepanjang2018

Carlos Roy Fajarta, 67 Pihak Ajukan Gugatan Presidential Threshold , Semuanya Ditolak MK, nasional.sindonews.com/67PihakAjukanGugatanPresidentialThresholdSemuanyaDitolakMK

Denninger, Erhard, Judicial Review Revisited: The German Experience, tulanelawreview.org/JudicialReviewRevisited:TheGermanExperience

Dimas Hutomo, Dapatkah Menguji Kembali Materi Muatan Pasal yang Sama ke MK?, hukumonline.com/DapatkahMengujiKembaliMateriMuatanPasalnyaSamakeMK?

Erisamdy Prayatna, Hilangnya Kewenangan Menuntut Karena Ne Bis In Idem erisamdyprayatna.com/HilangnyaKewenanganMenuntutkarenaNeBisInIdem

Erizka Permatasari, Bedanya Judicial Review dengan hak Uji Materiil, [hukumonline/bedanya Judicial Review dengan Hak Uji MateriilHakimKonstitusi](http://hukumonline/bedanyaJudicialReviewdenganHakUjiMateriilHakimKonstitusi), mkri.id/Hakim

Iva Nurdianah Azizah, Asas Ne Bis In Idem dan Kepastian Hukum djkn.kemenkeu.go.id/AsasNeBisInIdemdanKepastianHukum

Ketua MK Paparkan Independensi Kekuasaan Kehakiman kepada Mahasiswa FH Universitas Riau mkri.com/KetuaMKPaparkanIndependensiKekuasaanKehakimankepadaMahasiswaFHUniversitasRiau

Mahatma Chryshna, Judicial Review Mahkamah Konstitusi Atas Ketentuan Presidensial Threshold, kompaspedia.kompas.id/JudicialReviewMahkamahKonstitusiAtasKetentuanPresidentialThreshold

Menyoal Pemaknaan Asas “Ne Bis In Idem” dalam UU Pengadilan Pajak, mkri.id/MenyoalPemaknaanAsas”NeBisInIdem”dalamUUPengadilanPajak

M. Guntur Hamzah, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

MK Tolak Pemohonan Uji UU Pengadilan Pajak PT Sainath Realindo, mkri.id/MK
TolakPermohonanUjiUUPengadilanPajakPTSainathRealindo

MK Putuskan Koreksi Paliamentary Threshold 4 Persen, HNW: Demi Keadilan, MK Seharusnya Juga Koreksi Presidential Threshold 20 Persen, mpr.go.id/MKPutuskanKoreksiPaliamentaryThreshold4Persen,HNW:DemiKeadilan,MKSeharusnyaJugaKoreksiPresidentialThreshold20Persen

Nabilah Muhamad, Ada 49 Caleg Mantan Napi Korupsi di Pemilu 2024, Ini Partai Asalnya,

databoks.katadata.co.id/Ada49CalegMantanNapiKorupsiDiPemilu2024IniPartaiAsalnya

Perbedaan Pendapat Oleh Hakim: Corrupting dan Dissenting Opinion, dntlawyers.com/PerbedaanPendapatOlehHakimPerbedaanConcurringsdanDissentingOpinion

Praperadilan Ditolak, Kubu Rizieq Ingin Gugat Pasal KUHAP, cnnindonesia.com/PraperadilanDitolakKubuRizieqInginGugatPasalKUHAP

Roy Fajarta, Pihak Ajukan Gugatan Presidential Threshold Semuanya Ditolak Mahkamah Konstitusi, www.nasional.sindonews.com/PihakAjukanGugatanPresidentialThresholdSemuanyaDitolakMK

Saiful Alam, Peradilan Konstitusi di Sepuluh Negara, saplaw.top/PerbandinganMKdi10Negara

Saldi Isra, Pengujian Undang-Undang Demi Menjaga Demokrasi dan Konstitusi, mkri.com/PengujianUndang-UndangDemiMenjagaDemokrasidanKonstitusi

Sania Mashabi, Bayu Galih, Putusan MK Soal UU KPK: 3 Perkara Ditolak, 3 Perkara Diterima, 1 Perkara Dikabulkan Sebagian, nasional.kompas.com/PutusanMKSoalUUKPK3PerkaraDitolak3TakkDiterima

Sri Pujianti, UU Cipta Kerja Tak Memenuhi Unsur Kegentingan Memaksa Masalah Ekonomi, mkri.id/Berita

Tomi, Living Constitution: Perukah Diterapkan Indonesia? krjogja.com/LivingConstitution:PerukahDiterapkanIndonesia?

Tri Jata Ayu Pramesti, Arti Res Judicata Pro Veritate Habetur hukumonline.com/ArtiResJudicataProVeritateHabetur

Urifsky Melvin, MarburyVMadison, www.britannica.com/MarburyVMadison

Utami Argawati, Tolak Uji Formil, Uji Materiil UU Cipta Kerja Dilanjutkan, mkri.id/Berita

Willa Wahyuni, 2 Lembaga Yang Berwenang Menguji Peraturan Perundang-Undangan hukumonline.com/2LembagaYangBerwenangMengujiPeraturanPerundang-Undangan

Willa Wahyuni, Syarat Syarat Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana hukumonline.

com/SyaratSyaratAsasNeBisInIdemdalamHukumPidana

Yuda Meizar Pratama Sopandi, Mengenal Asas Ne Bis In Idem dalam Hukum Pidana

dntlawyers.com/MengenalAsasNeBisInIdemdalamHukumPidana

Zidan Takalamingan, Dissenting Opinion dalam putusan MK NO.90/PUU-XVIII/2020 yang Menjadikan MK sebagai Lembaga Mahkamah Kepentingankompasiana.com/

[DissentingOpiniondalamputusanMKNO.90/PUU-](http://DissentingOpiniondalamputusanMKNO.90/PUU-XVIII/2020yangMenjadikanMKsebagaiLembagaMahkamahKepentingan)

XVIII/2020yangMenjadikanMKsebagaiLembagaMahkamahKepentingan

